



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA
DI KECAMATAN LASOLO KABUPATEN KONAWE UTARA**

Muhamad Irfan Rama, Nartin

Universitas Lakidende Unaaha

(Naskah diterima: 20 November 2019, disetujui: 25 Desember 2019)

Abstract

This study reveals the policy of village funds in Belalo Village and Lalowaru Village as a research locus. Village funds as a policy that has been decided by the central government in the framework of accelerating village development must be able to be implemented appropriately and effectively by village government officials as not implementing. Village funds as a government policy can achieve the goals or objectives and positive motivation of the village government as an implementer which is supported through activities or programs that are needed by the community. The facts revealed were contrary to the non-implementation of village funds in Belalo Village and Lalowaru Village such as the questionable facts that were not implemented in implementing village fund policies were the village financial technical implementers consisting of village heads, village secretaries, section heads and village treasurers. There is no village fund implementer to manage village funds with a pattern of self-management.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Village Funds, Development.

Abstrak

Penelitian ini mengungkap kebijakan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru sebagai lokus penelitian. Dana desa sebagai kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat dalam kerangka percepatan pembangunan desa harus dapat diimplementasikan dengan tepat dan efektif oleh aparat pemerintah desa sebagai tidak pelaksana. Dana desa sebagai kebijakan pemerintah dapat mencapai tujuan atau sasaran dan motivasi yang positif dari pemerintah desa sebagai tidak pelaksana yang didukung melalui kegiatan atau program-program yang dibutuhkan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap bertentangan dengan tidak pelaksana dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru seperti fakta yang dipertanyakan yang menjadi tidak pelaksana dalam implementasi kebijakan dana desa adalah pelaksana teknis keuangan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Tidak ada pelaksana dana desa untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan pola pelaksanaan swakelola.

Kata Kunci: Efektifitas, Implementasi, Dana Desa, Pembangunan.

I. PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pembangunan pedesaan dapat terlaksana dengan cepat apabila didukung kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif sebagai payung hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Sehubungan dengan Alokasi Dana

Desa di Kecamatan Lasolo tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan pedesaan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar.

Berdasarkan fenomena implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara yang belum terlaksana secara efektif untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat yang belum menjadi prioritas dari aparat desa sebagai pengelola dana desa. Hal ini disebabkan pada sumber daya manusia atau aparat desa yang melakukan pengelolaan dana desa belum dapat melakukan pengelolaan anggaran tersebut secara maksimal. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik kadang tidak tepat sasaran dan tidak mengutamakan pembangunan sarana yang menjadi skala prioritas. Selain itu, terdapat kendala kurang melibatkan masyarakat untuk membuat perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian implementasi ADD dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia atau aparat desa yang melakukan pengelolaan dana desa. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan studi efektivitas implementasi ADD dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan

Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Dari hasil studi tersebut dapat diketahui efektivitas ADD di Kecamatan Lasolo.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Pencapaian tujuan dalam organisasi sangat dicita-citakan baik dalam lingkungan organisasi publik maupun organisasi swasta (bisnis). Hal ini dapat tercapai jika seluruh potensi dalam organisasi dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat dinilai dan diukur tingkat efektivitas organisasi tersebut. Mengenai efektivitas ini dapat diperoleh pemahaman yang berbeda-beda tergantung dari sisi mana para pakar memberi pengertian atau definisi-definisi tersebut.

Pendapat yang relevan mengenai efektivitas juga dikemukakan oleh Stoner (1992: 9) bahwa “efektivitas itu ialah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai melakukan hal yang tepat”. Selain efektivitas sebagai salah satu cara untuk menentukan tujuan tercapai atau tidak maka efektivitas dalam organisasi juga dapat diukur dengan melihat indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Indrawijaya (2000: 228) bahwa:

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli maka dalam kebijakan

publik dapat diketahui elemen-elemen penting dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu dan (3) Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.3 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2008:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*” yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai :“ (1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*” (Webster’s Dictionary, dalam Tachjan, 2008:23).

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:74), bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain: (1) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (2) Karakteristik-karakteristik badan pelaksana; (3) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi; (4) Kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan.

Kunarjo (2003:89) program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu: (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur; (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternative untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran; (3) Program dapat dihitung secara analisis *cost benefit*. Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila di dalam proses pelaksanaan terhadap

program menurut Kuncoro (2007: 214) memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat dipenuhi.
2. Pengalokasian ADD Kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.

Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Menurut Van meter dan Van Horn (Agustino, 2008: 141-144) mengemukakan bahwa implementasi

kebijakan dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: (1) tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau kecenderungan pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi (6) lingkungan (ekonomi, sosial dan politik). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi.

Relevan dengan pendapat tersebut, menurut George C. Edward III (Agustino, 2008: 149) bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

2.5 Konsep Anggaran dan Pengelolaan

Anggaran

Menurut Due dan Baswir (2000) bahwa anggaran adalah suatu perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode di masa depan. Menurut Albedian dan Samuel bahwa anggaran negara adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. orientasinya adalah pencapaian kesejahteraan rakyat, dalam (Bake, 2009: 17).

2.6 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan mempunyai banyak pengertian yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Konteks pembangunan

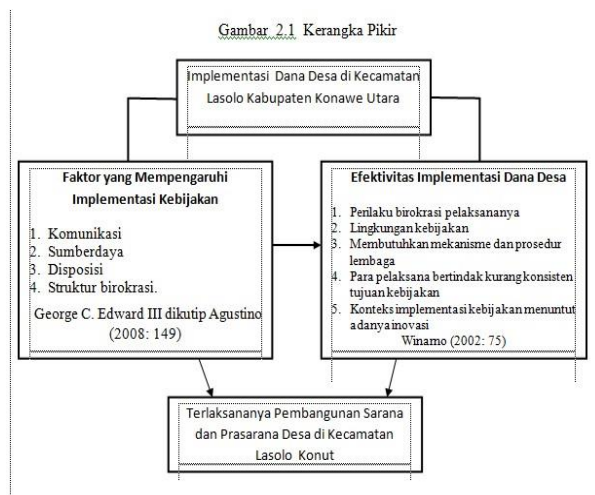
dapat dikemukakan menurut pendapat para pakar dalam pembangunan. Menurut Katz (Moeljarto, 2005: 3) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi

2.7 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan permasalahan dalam penelitian ini, maka kerangka pikir sehubungan dengan studi efektivitas implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Dalam studi efektivitas implementasi ADD penulis akan merujuk pada konsep Winarno (2002: 75) mengemukakan bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan: (1) Perilaku birokrasi pelaksanaannya, (2) Lingkungan kebijakan, (3) Membuktikan mekanisme dan prosedur lembaga, (4) Para pelaksana bertindak kurang konsisten tujuan kebijakan (5) Konteks implementasi kebijakan menuntut adanya inovasi.

Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diperkirakan tidak berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Karena itu penelitian ini penulis merujuk konsep faktor-faktor yang mempengaruhi

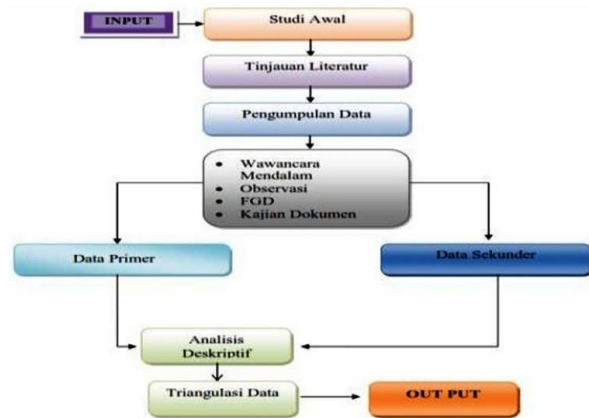
implementasi kebijakan yang dikemukakan merujuk teori George C. Edward III dikutip Agustino (2008: 149) bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Dengan merujuk konsep tersebut maka pelaksanaan kebijakan ADD dalam percepatan pembangunan dapat diketahui tingkat keberhasilannya pelaksanaan kebijakan ADD yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Kerangka pikir penelitian ini dapat di lihat gambar 2.1 yakni:



III. METODE PENELITIAN

Diagram Alir Penelitian

Dalam upaya pencapaian signifikansi penelitian yang terukur maka peneliti membuat secara ringkas diagram alir penelitian sebagai berikut :



Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengkaji implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan percepatan pembangunan di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. John Creswell dalam (Silalahi, 2009:77) penelitian kualitatif dapat dikonstruksi sebagai satu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pendekatan induktif.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari aparat desa sebanyak 8 orang, 4 orang dari anggota Badan Perwakilan Desa, 4 orang dari kalangan masyarakat. Untuk mendapat data tambahan ditetapkan Camat Lasolo dan Kepala Badan BPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai informan. Penunjukkan informan tersebut dengan pertimbangan karena kewen-

ngan dan kompetensi. Informan penelitian tersebut ditetapkan dengan cara *purposive*. Teknik pemilihan informan untuk menjadi sumber data primer (melalui wawancara) berdasarkan kewenangan, kompetensi, tanggung jawab dan pengetahuan serta informasi yang dimiliki sehubungan efektivitas implementasi Alokasi Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara sehubungan dengan efektivitas implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen, pada Kantor Camat Lasolo Kabupaten Konawe Utara, instansi yang terkait, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, dan buku teks sehubungan dengan efektivitas implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.

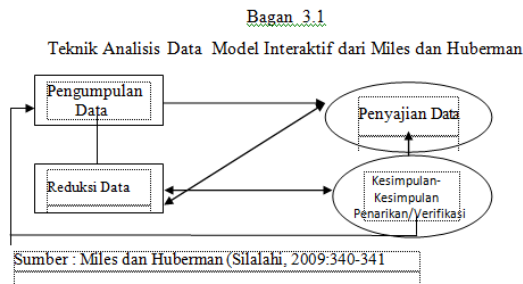
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua cara yakni:

1. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) atau wawancara tak terstruktur, yaitu penulis melakukan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) tentang efektivitas implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
2. Studi Dokumen, yaitu penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data dalam penelitian agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategorisasi. Analisis data merupakan proses penyusunan, penyederhanaan data untuk lebih sederhana dan mudah dibaca serta mudah diintegrasikan. Analisis data telah dimulai sejak merumuskannya dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.



IV. HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lasolo

Dalam studi ini berusaha untuk mengungkapkan implementasi kebijakan dana desa sebagai kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan percepatan pembangunan desa secara menyeluruh dengan mengucur dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan dana desa yang diambil pemerintah dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan apabila dapat diimplementasikan oleh para pelaksana (implementor) yaitu aparatur desa. Desa Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi dan Desa Lalowaru sebagai penerima dana desa yang paling rendah di Kecamatan Lasolo dapat melakukan pengelolaan dana desa karena didukung dengan unsur pelaksana yakni aparat pemerintah desa, adanya program yang dilaksanakan dan adanya kelompok sasaran. Fakta yang terungkap dalam studi ini dapat uraikan sebagai berikut:

1. Unsur pelaksana

Studi ini berusaha untuk mengungkapkan unsur pelaksana kebijakan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru sebagai lokus penelitian. Dana desa sebagai kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan desa harus dapat diimplementasikan secara tepat dan efektif oleh aparat pemerintah desa sebagai unsur pelaksana. Dana desa sebagai kebijakan pemerintah dapat mencapai tujuan atau sasaran dan dampak yang positif apabila aparat desa sebagai unsur pelaksana mampu mengimplementasikan melalui kegiatan atau program-program yang dibutuhkan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap sejalan dengan unsur pelaksana dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru seperti diungkapkan informan bahwa: Pada dasarnya yang menjadi unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan dana desa adalah pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Unsur pelaksana dana desa tersebut melakukan pengelolaan dana desa dengan pola pelaksanaan swakelola. Jadi unsur aparat desa menjadi pelaksana kebijakan dana desa dalam berbagai kegiatan (wawancara, 13 Pebruari 2017). Data tersebut

membuktikan bahwa unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Belalo adalah terdiri dari unsur aparat desa yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa. Pendapat yang relevan juga dikemukakan salah satu informan yang menyatakan bahwa: Unsur pelaksana dana desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab, sekretaris desa sebagai koordinator unsur, kepala seksi dan bendahara desa sebagai unsur pelaksana.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru dapat terlaksana secara efektif karena adanya program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Desa Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi memiliki perbedaan program kegiatan dengan Desa Lalowaru yang sebagai penerima dana desa yang paling rendah. Namun secara umum dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa lebih difokuskan pada aspek atau bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat namun program atau kegiatannya dapat berbeda-beda. Fakta-fakta yang terungkap sehubungan de-

ngan adanya program yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa seperti yang diungkapkan informan bahwa Dalam pengelolaan dana desa kami memiliki program bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti TAPPD, program pembangunan desa seperti pembangunan gedung posyandu dan pembukaan JUT (wawancara, 13 Februari 2017). Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo didukung dengan adanya program yang dilaksanakan yaitu dana desa digunakan untuk membiayai item kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa seperti pembangunan gedung posyandu dan pembukaan jalan usaha tani.

3. Target group atau kelompok sasaran.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru tahun 2016 telah ditetapkan jenis kegiatan yang difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat bidang tersebut juga ditetapkan kelompok sasaran (*target group*) yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan dengan pola pelaksanaan swakelola artinya dilakukan sendiri oleh masyarakat dibawah tanggung jawab kepala desa. Kelompok sasaran

dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru adalah masyarakat itu sendiri. Semua jenis kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dengan adanya kelompok sasaran (*target group*) dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru dapat efektif hasilnya dan tujuan penggunaan dana desa tepat sasaran. Dalam studi ini fakta terkait dengan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sebagaimana seperti yang diungkapkan salah satu informan yang menyatakan bahwa: Dalam pengelolaan dana desa di Desa Belalo sangat diprioritaskan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran yang menjadi pengelola atau pelaksana setiap jenis kegiatan misalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada kegiatan TAPPD dengan kelompok sasaran sebanyak 45 orang.

4. Faktor yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Dana Desa di Kecamatan Lasolo

Dalam studi ini berusaha untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowaru Kecamatan Lasolo. Dana desa sebagai kebijakan pemerin-

tah yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan pedesaan dengan menggunakan dana APBN melalui transfer APBD diperlukan implementasi yang efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif dapat dipengaruhi dari faktor komunikasi, sumberdaya, sikap atau disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi alat analisis dalam mengungkapkan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang efektif di Desa Belalo dan Desa Lalowaru.

5. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Lalowaru Kecamatan Lasolo. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa baik di Desa Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi maupun Desa Lalowaru sebagai penerima dana desa yang paling rendah. Dalam komunikasi sangat menentukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yakni sosialisasi tujuan kebijakan dana desa dan manfaat implementasi kebijakan dana desa. Fakta-fakta yang terungkap sejalan dengan faktor komuni-

kasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo

Berdasarkan fakta yang terungkap dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dapat terlaksana dengan efektif karena adanya komunikasi yang dilakukan aparatur desa atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Belalo dengan warga masyarakat yang bertujuan untuk memberi pengetahuan tujuan, manfaat dan sasaran dalam implementasi kebijakan dana desa di Desa Belalo. Dengan adanya komunikasi warga masyarakat memahami posisinya ketika pengelolaan dana berlangsung. Masyarakat dapat berkontribusi langsung melalui kegiatan fisik dan non fisik terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dapat diketahui bahwa dengan adanya komunikasi antar aparatur desa dengan warga masyarakat ketika implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Lalowaru maka implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara lancar dalam arti masyarakat dapat ikut serta dalam beberapa kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Para Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Lalowaru dapat komunikasi secara baik dan efektif, jelas dan konsisten tentang tujuan, manfaat dan sasaran implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Lalowaru sehingga masyarakat banyak yang terlibat dalam kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

6. Sumber daya

Dalam studi ini berusaha untuk menelusuri salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi dan Desa Lalowaru sebagai penerima dana desa yang paling rendah, yakni faktor sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, sumber daya sangat penting untuk keberhasilan dana desa. Tanpa didukung dengan sumberdaya implementasi kebijakan pengelolaan dana desa tidak dapat terlaksana secara efektif. Sumber daya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa seperti staf, informasi, wewenang, anggaran dan fasilitas yang tersedia. Dengan dukungan sumber daya maka implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara efektif. Fakta-fakta

yang terungkap di lapangan sehubungan dengan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo sebagaimana dikemukakan informan bahwa: Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa yang terpenting adalah kemampuan aparatur desa atau staf pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dalam melaksanakan kebijakan dana desa. Para staf pelaksana merupakan sumber daya paling utama untuk terwujudnya pengelolaan dana desa. selain itu, informasi mengenai cara pelaksanaan implemementasi kebijakan dana desa dan informasi kepatuhan para pelaksana tentang regulasi yang digunakan dalam implementasi pengelolaan dana desa.

7. Sikap atau Disposisi

Dalam studi ini juga berusaha untuk menelusuri salah satu dimensi penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan di Desa Lalowaru yaitu disposisi atau sikap para pelaksana atau implementor dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa. Sikap implementor sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa seperti sikap kesadaran, kesediaan menerima program, sikap menolak kebijakan, dan sikap

dukungan dari pimpinan (kepala desa). Dengan demikian sikap para pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fakta-fakta yang terungkap sehubungan dengan sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo sebagai penerima dana desa tertinggi seperti yang diungkapkan informan bahwa: Pada dasarnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa karena adanya sikap kesadaran, sikap menerima kebijakan atau program dan sikap dukungan dari atasan para pelaksana. Jadi sikap para pelaksana dalam pengelolaan dana desa cukup baik sehingga kegiatan yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan menggunakan dana desa (wawancara dengan IW, 13 Februari 2017). Pendapat tersebut menggambarkan bahwa sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sangat menentukan keberhasilan program yang telah direncanakan. Fakta tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran,

mendukung implementasi kebijakan atau sikap positif dan adanya dukungan dari pimpinan atau kepala desa maka implementasi pengelolaan dana desa yang diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara efektif.

8. Struktur birokrasi

Salah satu dimensi penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lolawaru adalah struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa membutuhkan norma-norma dan pola-pola hubungan dalam struktur birokrasi yang telah dibentuk terkait dalam pengelolaan dana desa. Dimensi struktur birokrasi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lolawaru diamati dari (1) fragmentasi dan (2) standar prosedur operasional. Fakta-fakta yang terungkap sehubungan dengan struktur birokrasi sebagai sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo sebagaimana yang diungkapkan informan bahwa: Pada dasarnya para pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan dana

desa yang diwujudkan dalam kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat selalu dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur kerja kami memiliki keseragaman dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dapat diketahui bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lolawaru. Struktur birokrasi dalam pengelolaan dana desa adalah hal yang fundamental dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dan mutlak harus ada karena dalam struktur birokrasi dibutuhkan norma-norma atau nilai-nilai berupa standar prosedur operasional yang menjadi rujukan tindakan yang sama dari para pelaksana dan dibutuhkan fragmentasi yakni penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Standar prosedur operasional dan penyebaran tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowwaru Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dapat terlaksana dengan baik karena cerminan dari (a) Unsur pelaksana, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan efektif karena adanya dukungan dari aparatur desa atau para pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, (b) Adanya program yang dilaksanakan, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa difokuskan pada kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan (c) *Target group* atau kelompok sasaran, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa terdapat kelompok sasaran dan manfaat yang diperoleh melalui kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Belalo dan Desa Lalowwaru Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, adalah (a) Komunikasi, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa aparatur desa melakukan komunikasi dengan masyarakat agar mengetahui tujuan, sasaran dan manfaat implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, (b) Sumberdaya, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dibutuhkan dan didukung staf, informasi, wewenang, dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, (c) Sikap atau disposisi, dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa didukung dengan sikap para pelaksana seperti sikap kesadaran, sikap positif atau mendukung implementasi kebijakan dana desa, dan dukungan dari pimpinan (kepala desa) selaku penanggung jawab atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang me-

nggunakan dana desa dapat terlaksana efektif, dan (d) Struktur birokrasi, bahwa dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan efektif karena adanya fragmentasi yakni pembagian atau penyebaran tanggung jawab pada aparatur desa seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Adanya standar prosedur operasional, bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa karena para pelaksana selalu bertindak sesuai dengan standar prosedur operasional dalam pengelolaan dana desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Bake, Jamal. 2009. *Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas Anggaran Negara: Rekonstruksi Paradigma Pengelolaan Anggaran Negara Menuju Good Governance*. FITRA: Jakarta.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2005. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kuncoro, Mudrajat. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI – Press.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: BAPPEDA Propinsi NTB.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama: Bandung.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Nugroho D, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wirjana, Bernadine R. dan Susilo, Supardo. 2006. *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 1989. *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.